



Kajian Penguatan Kapasitas dan Kolaborasi Kelembagaan Pendukung Pengembangan Agribisnis Berkelanjutan di Kabupaten Semarang

Adelia Agesta Herawati

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : adelagesta@students.unnes.ac.id

Alamat : Sekaran, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Abstract. *The development of horticultural agribusiness in Semarang Regency still faces structural challenges, particularly in terms of weak local institutions and suboptimal collaboration between key development actors. Cabbage commodity as one of the leading products shows low marketing efficiency due to the long distribution chain and the dominance of intermediaries. This condition has an impact on the low income of farmers and limited access to fair and transparent markets. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method. The results of this study show that the direct marketing channel between farmers and consumers is an efficient channel, but there is no dominant practice due to the lack of institutional support such as cooperatives. Collaboration based on the Penta Helix model involving government, academia, community, private sector, and media has begun to build, but has not been coordinated systematically. Therefore, strategies to strengthen local institutions and integrate cross-sector actors are urgently needed to improve the agribusiness system. Regional policy support, technology training, and sustainable monitoring mechanisms are also needed so that agribusiness development can provide more equitable economic benefits, improve farmers' bargaining position, and encourage inclusive and sustainable rural economic growth.*

Keywords: *local institutions, cabbage agribusiness, collaboration, penta helix, marketing efficiency*

Abstrak. Pengembangan agribisnis hortikultura di Kabupaten Semarang masih menghadapi tantangan struktural, terutama pada aspek kelembagaan lokal yang lemah dan belum optimalnya kolaborasi antar aktor utama pembangunan. Komoditas kubis sebagai salah satu produk unggulan menunjukkan efisiensi pemasaran yang rendah akibat panjangnya rantai distribusi dan dominasi perantara. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pendapatan petani dan terbatasnya akses terhadap pasar yang adil dan transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saluran pemasaran langsung antara petani dan konsumen merupakan jalur yang efisien, namun belum terjadi praktik dominan karena minimnya dukungan kelembagaan seperti koperasi. Kolaborasi berbasis model Penta Helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, swasta, dan media telah mulai terbangun, tetapi belum terkoordinasi secara sistematis. Oleh karena itu, strategi penguatan kelembagaan lokal dan integrasi aktor lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem agribisnis. Diperlukan pula dukungan kebijakan daerah, pelatihan teknologi, serta mekanisme monitoring yang berkelanjutan agar pengembangan agribisnis dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata, meningkatkan posisi tawar petani, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kelembagaan lokal, agribisnis kubis, kolaborasi, penta helix, efisiensi pemasaran.

1. PENDAHULUAN

Pengembangan kawasan perdesaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Sebagai wilayah yang sebagian besar aktivitasnya berbasis pada sektor pertanian, perdesaan memerlukan strategi pembangunan yang menitik-beratkan pada peningkatan produktivitas sektor ini. Menurut Syafaat et al., (2005) strategi pertanian yang efektif harus mencakup empat hal utama, yaitu: (1) penguatan ketahanan pangan, (2) pemenuhan kebutuhan pasar domestik, (3) penguatan ekspor dengan mempertimbangkan potensi wilayah, (4) peningkatan investasi, khususnya dalam pengembangan *human*

capital dan *social capital* (Syafaat et al., 2005 dalam Sayoga, 2022). Namun, dalam praktiknya, pengembangan kawasan perdesaan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya akses terhadap modal dan pasar, serta lemahnya kapasitas kelembagaan lokal. Oleh karena itu, pentingnya untuk membangun jaringan ekonomi perdesaan yang kuat, berbasis pada semangat swadaya dan solidaritas komunitas lokal (Martodireso & Suryanto, 2002).

Salah satu pendekatan yang dianggap efektif dalam mengatasi tantangan tersebut adalah dengan membangun kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi bukan hanya berarti kerjasama formal, melainkan integritas kemampuan, sumber daya, dan kepentingan berbagai aktor untuk mencapai tujuan bersama secara berkelanjutan (Brown & Sonwa, 2015; Fatimah & Naldi, 2019; Rivera, 2019). Dalam konteks pertanian, kolaborasi menjadi sangat penting mengingat rantai nilai pertanian yang panjang dan kompleks, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, diperlukan keterlibatan banyak pihak, mulai dari ahli teknologi, pelaku usaha, lembaga keuangan, hingga media informasi, dalam satu kerangka strategis (Agyemang et al., 2015; Fatimah & Naldi, 2019). Upaya kolaboratif ini sejalan dengan konsep pengembangan agribisnis modern, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, memperbesar skala usaha, meningkatkan kualitas hasil produksi, membuka peluang diversifikasi, serta mempercepat adopsi teknologi (Sayoga, 2019; Sayoga & Kharisma, 2024).

Salah satu contoh konkret dari persoalan lemahnya kelembagaan agribisnis di Tingkat lokal dapat dilihat pada pengelolaan komoditas kubis (*Brassica Oleracea*) di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kubis merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dibudidayakan oleh petani di wilayah Kecamatan Getasan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, pada tahun 2023 luas panen kubis di Kabupaten Semarang mencapai 429 hektare dan pada tahun 2023 mencapai 199 hektare dengan total produksi sebesar 100.501 kuintal pada tahun 2023 dan sebesar 85.463 kuintal pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa kubis memiliki kontribusi signifikan terhadap sistem pertanian hortikultura di daerah Kabupaten Semarang, sekaligus menjadi sumber utama pendapatan petani di Kawasan dataran tinggi. Namun, potensi ekonomi tersebut belum diiringi dengan kelembagaan pendukung yang memadai. Petani masih bergantung pada mekanisme penjualan konvensional melalui tengkulak dan pedagang pengumpul, yang seringkali menentukan harga secara sepihak. Selain itu, keterlibatan Lembaga pembiayaan masih sangat terbatas dalam mengatur niaga kubis, mendistribusikan informasi pasar, maupun memperluas akses terhadap teknologi pascapanen. Minimnya kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, swasta (misalnya off-

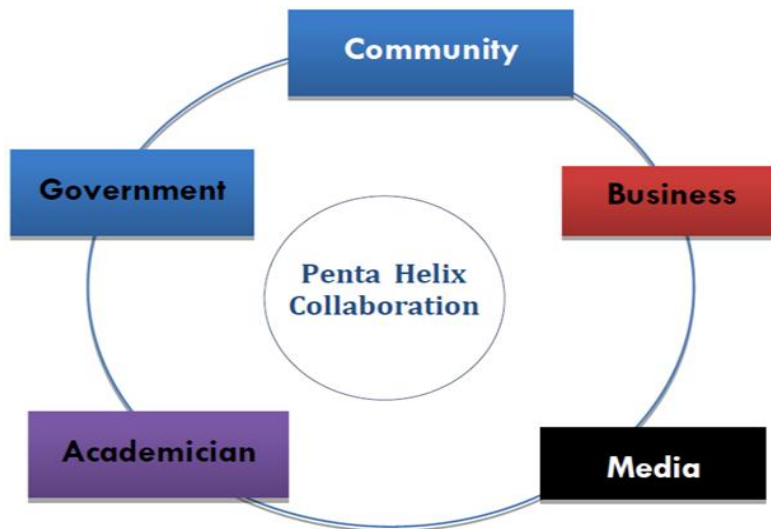
taker), dan lembaga keuangan menyebabkan nilai tambah kubis lebih banyak dinikmati oleh pelaku distribusi di hilir ketimbang oleh petani produsen itu sendiri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dalam sistem agribisnis hortikultura tidak dapat dipisahkan dari dukungan lintas aktor yang terkoordinasi secara efektif. Institusi lokal seperti kelompok tani, koperasi, serta lembaga keuangan mikro berperan sebagai aktor utama dalam mengorganisasi sumber daya, memperkuat posisi tawar petani, dan meningkatkan resiliensi komunitas terhadap dinamika pasar global. Kabupaten Semarang, sebagai wilayah dengan akses pasar regional yang baik seperti Kota Semarang dan Salatiga, seharusnya mampu mengoptimalkan pengelolaan komoditas kubis melalui strategi kelembagaan yang integratif. Suharto (2005) menyatakan bahwa keberhasilan lembaga lokal sangat bergantung pada tingkat kepercayaan, keterbukaan, serta kapasitas manajerial yang dimiliki para pengelolanya. Institusi lokal yang kuat mampu bertindak sebagai katalisator perubahan sosial dan ekonomi, mempercepat transfer teknologi, serta mengorganisasi kerjasama lintas sektor (Brown & Sonwa, 2015).

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis sejauh mana peran kelembagaan pendukung dalam pengembangan agribisnis kubis di Kabupaten Semarang, serta bagaimana kolaborasi antara aktor kunci dapat diperkuat untuk menciptakan sistem agribisnis yang berkelanjutan dan berpihak pada petani. Dengan mengambil studi kasus kubis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan peluang pengembangan kelembagaan agribisnis hortikultura di tingkat daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mempercepat akselerasi pengembangan potensi desa, diperlukan suatu pendekatan kolaboratif yang sistematis, salah satunya melalui model *Penta Helix*. Model ini mengintegrasikan lima faktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, dalam satu kerangka kerja bersama saling melengkapi (Fatimah dan Naldi, 2019; Sudiana et al., 2020). Dengan keterlibatan lima aktor ini, diharapkan pengembangan potensi lokal dapat berjalan lebih efektif, adaptif terhadap perubahan, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.



Sumber: Fatimah dan Naldi, 2019.

Gambar 1. Matriks Penta Helix

Implementasi metode *Penta Helix* dalam pengembangan potensi lokal desa mencakup elemen-elemen penting yang saling berinteraksi dan diharapkan mampu menghasilkan dampak besar serta berkelanjutan. Lima elemen utama yang terlibat, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, berperan sebagai akselerator dalam mendorong pengembangan potensi wilayah (Fatimah dan Naldi, 2019). Dalam konteks kelembagaan lokal, komunitas memiliki posisi strategis sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, di mana keterlibatan aktif komunitas sangat menentukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Demi memastikan efektivitas dan efisiensi program pembangunan, diperlukan koordinasi yang intensif serta kerjasama yang erat antar pemangku kepentingan dengan mengidentifikasi dua fungsi strategis dari kerjasama tersebut: pertama, karena keterbatasan kapasitas pemerintah, terutama dalam aspek pembiayaan, mengharuskan keterlibatan pihak lain dalam mendukung pelaksanaan pembangunan; kedua, kecenderungan prioritas pembangunan yang masih sentralistik menimbulkan kebutuhan akan penjangkaran aspirasi masyarakat lokal, sehingga program yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat di tingkat desa (Brown & Sonwa, 2015; Wankmüller & Reiner, 2020).

Institusi mencerminkan pola perilaku, pengakuan terhadap peran, serta struktur anggota-anggotanya (Brown dan Sonwa, 2015). Dalam konteks desa, institusi lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan potensi wilayah, karena mereka merupakan pihak yang paling memahami kondisi lapangan, paling cepat dalam mengidentifikasi masalah, serta paling responsif dalam mencari solusi atas permasalahan yang muncul (Sayoga, 2019). Institusi lokal yang memainkan peranan strategis ini antara lain adalah para petani, baik sebagai individu

maupun yang tergabung dalam kelompok tani, koperasi sebagai wadah untuk memasarkan bahan baku dan produk akhir, menjaga stabilitas produksi serta harga, dan pihak swasta yang turut aktif dalam memperkuat kapitalisasi usaha lokal. Peningkatan kapitalisasi ini memungkinkan institusi lokal untuk mengembangkan program peningkatan keterampilan, misalnya melalui pelatihan berbasis kebutuhan atau *customized training* (Arsyad, 1999), yang dirancang sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi atau kelompok tani. Modernisasi juga menjadi aspek penting yang perlu diterapkan. Studi di Rumania menunjukkan bahwa modernisasi di kalangan pelaku ekonomi perdesaan berdampak positif terhadap produktivitas komoditas, dan proses ini terus berlanjut melalui transfer keterampilan antar kelompok secara mandiri, tanpa ketergantungan yang besar pada intervensi pemerintah (Matei dan Iordache, 2016). Variasi hasil pembangunan institusi lokal ini dipengaruhi oleh struktur organisasi, fungsi yang dijalankan, serta pola pengembangannya yang sangat kontekstual dan spesifik di masing-masing wilayah (Brown dan Sonwa, 2015).

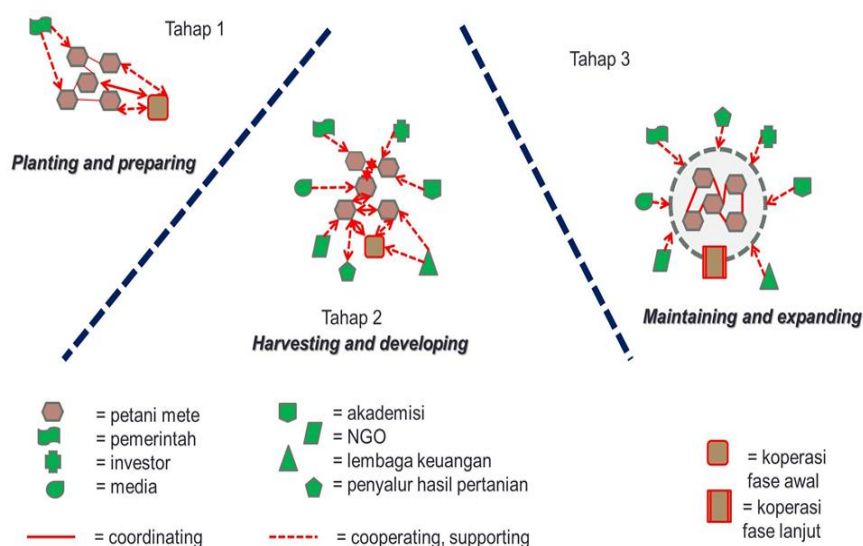
Penguatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat melalui institusi lokal, dan sektor swasta yang dilakukan secara sinergis dan saling mendukung akan memperkuat peran masing-masing pihak dan mendorong semua aktor untuk mengoptimalkan kontribusinya. Selain itu, kehadiran akademisi sebagai pihak yang netral dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat (Suharto, 2005). Untuk menjaga agar pencapaian tujuan pembangunan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan, diperlukan penerapan sistem monitoring yang terencana. Monitoring *ex-ante* perlu disusun secara sistematis guna memperjelas tujuan dan memungkinkan pemantauan serta evaluasi secara berkesinambungan. Monitoring ini melibatkan observasi sistematis dan terus-menerus terhadap aktivitas dan hasil yang sedang berjalan, memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengawasi pemanfaatan input, serta mendeteksi lebih awal potensi penyimpangan dari tujuan dan hasil yang diharapkan (Horton et al., 2003).

Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan menjadi krusial agar program pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, serta menghindari kegagalan keberlanjutan program (Sayoga, 2019). Terdapat dua fungsi strategis dalam kerjasama ini: pertama, mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah, khususnya dalam aspek pembiayaan, sehingga diperlukan kontribusi pihak lain dalam mendukung pembangunan; kedua, mengatasi kecenderungan prioritas pembangunan yang masih bersifat sentralistik, yang seringkali belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan lokal, sehingga penting dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal (Brown &

Sonwa, 2015; Suharto, 2005). Institusi, menurut Brown dan Sonwa (2015), mencerminkan pola perilaku, pengakuan peran, dan struktur yang dimiliki para anggota. Institusi lokal berperan vital dalam pembangunan desa karena memiliki pemahaman terbaik tentang kondisi lapangan, kecepatan dalam mengidentifikasi permasalahan, serta kemampuan dalam memberikan respon cepat terhadap tantangan yang muncul (Brown & Sonwa, 2015; Sayoga & Kharisma, 2024). Peran pihak swasta juga sangat diperlukan, terutama dalam menyediakan dukungan modal, yang sangat penting untuk mengantisipasi risiko kerugian maupun untuk mendukung ekspansi usaha (Arsyad, 1999; Sayoga, 2019).

Dengan adanya kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, komunitas dalam institusi lokal, sektor swasta, serta didukung oleh peran media, maka sinergi antar aktor pembangunan akan semakin kuat (Fatimah dan Naldi, 2019) dan mendorong semua pihak untuk mengoptimalkan perannya masing-masing (Brown dan Sonwa, 2015; McComb et al., 2016; Rivera, 2019). Pada akhirnya, keberhasilan program sangat ditentukan oleh sejauh mana konsensus di antara para stakeholder dapat diwujudkan secara efektif (McComb et al., 2016).

Dalam konteks pengembangan potensi lokal desa di Kabupaten Semarang, proses pengembangan pusat potensi desa dibagi menjadi tiga tahapan utama (Sayoga, 2019) sebagaimana pada gambar 2. Tahap pertama disebut sebagai "*planting and preparing*", di mana fokus utama adalah pada kegiatan usahatani, meliputi persiapan lahan, penanaman, hingga perawatan tanaman komoditas sampai siap dipanen (fase *planting*). Pada tahap ini, dukungan terhadap kegiatan usahatani masih terbatas pada pembangunan modal sosial antar anggota kelompok tani dan pembentukan cikal bakal koperasi yang berfungsi sebagai pusat kegiatan. Koperasi ini mulai menyediakan kebutuhan dasar seperti bibit, pupuk, serta berperan sebagai penampung hasil panen anggota (fase *preparing*). Selain itu, sarana penyimpanan hasil panen atau lumbung juga mulai dipersiapkan untuk memastikan hasil produksi dapat tertampung secara optimal.



Sumber: Sayoga, 2019

Gambar 2. Tiga Tahap Rencana Pengembangan Potensi Lokal Desa

Tahap kedua dikenal dengan istilah "*harvesting and developing*". Pada periode ini, tanaman yang telah ditanam sebelumnya telah berbuah dan siap dipanen (fase *harvesting*). Koperasi yang sebelumnya dirintis kini telah resmi terbentuk dengan landasan keuangan dan aset yang berasal dari kontribusi para anggotanya, meskipun masih didukung secara terbatas oleh lembaga keuangan. Pada fase *developing*, koperasi sudah mulai mampu mengelola usaha secara mandiri, memiliki tenaga ahli dalam bidang teknis budidaya, pemasaran, teknologi informasi, dan litbang, meskipun belum membentuk divisi-divisi khusus. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah, lembaga nirlaba, akademisi, dan media, telah mulai terjalin meski masih bersifat sporadis.

Tahap ketiga, yang disebut "*maintaining and expanding*", menandai fase di mana para petani telah menguasai teknik budidaya komoditas, manajemen ekonomi, dan pemanfaatan teknologi, dengan didukung modal sosial yang kuat dan kerjasama internal yang solid (fase *maintaining*). Koperasi pada tahap ini telah memiliki struktur yang kokoh dan mantap, melakukan diversifikasi usaha, membentuk subunit-subunit untuk kegiatan *on-farm*, pemasaran, dan teknologi, serta membangun unit penelitian dan pengembangan (*RD*) guna meningkatkan adaptasi terhadap perubahan zaman (fase *expanding*). Fungsi koperasi berkembang menjadi mediator utama yang menghubungkan anggota kelompok tani dengan pihak eksternal, termasuk lembaga pemerintah, lembaga non profit, akademisi, dan media. Kerjasama yang terjalin dapat langsung diarahkan kepada subunit-subunit koperasi sebagai bagian integral dari struktur kelembagaan tersebut, sehingga koperasi menjadi pusat kolaborasi seluruh stakeholder dalam pengembangan potensi lokal desa.

Agar pencapaian tujuan pembangunan tetap terjaga sesuai dengan rencana, diperlukan penerapan proses monitoring yang efektif. Monitoring *ex-ante* harus dirancang dan direncanakan secara sistematis untuk memperjelas tujuan dan memungkinkan pengawasan serta evaluasi berkala. Monitoring ini melibatkan pengamatan berkelanjutan terhadap aktivitas dan hasil yang dicapai oleh para stakeholder selama proses pengembangan berlangsung, memastikan bahwa kegiatan tetap sesuai rencana, memaksimalkan penggunaan input, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini (Horton et al., 2003). Pelaksanaan monitoring dapat diperkuat melalui pertemuan rutin atau berkala antar stakeholder sebagai salah satu mekanisme untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

- a. Penelitian ini menggunakan pendekatan-an kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, kelembagaan, dan ekonomi lokal dalam konteks pengembangan agribisnis hortikultura. Metode ini bersifat rasional, empiris, dan sistematis, dengan sasaran menghasilkan gambaran yang aktual dan kontekstual tentang praktik agribisnis kubi di Kabupaten Semarang. Rujukan metode ini merujuk pada Creswell (2026) serta Sayoga (2019), yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis partisipatif dan kontekstual dalam studi pembangunan lokal.
- b. Bahan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen laporan kelembagaan kelompok tani, dan publikasi ilmiah terkait pertanian.
- c. Prosedur penelitian meliputi:
 1. Penentuan parameter fokus penelitian yaitu kelembagaan petani, pola kolaborasi, dan efisiensi pemasaran
 2. Metode pengolahan data dilakukan secara tematik, menggunakan kategorisasi dan interpretasi naratif berdasarkan pendekatan induktif
 3. Analisis difokuskan pada pola hubungan antar aktor dan dampaknya terhadap sistem agribisnis.
- d. Metode yang digunakan disusun secara terperinci, sehingga memungkinkan untuk diulangi dalam konteks wilayah atau komoditas hortikultura lain. Langkah-langkah pengumpulan dan analisis data dapat direplikasi dengan pendekatan studi kasus serupa di wilayah lain yang memiliki tantangan kelembagaan dan pemasaran sejenis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kerangka pengembangan potensi lokal, kolaborasi antar berbagai aktor menjadi salah satu kunci keberhasilan. Kolaborasi yang efektif tidak sekadar merupakan bentuk kerjasama biasa, melainkan upaya membangun sinergi berkelanjutan yang menghasilkan nilai tambah bersama serta mempercepat pencapaian tujuan jangka panjang. Hal ini relevan terutama dalam sektor agribisnis, di mana rantai nilai yang panjang menuntut keterlibatan aktif berbagai pihak mulai dari produksi hingga pemasaran, melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, serta praktik pemasaran yang transparan (Agyemang et al., 2015; Brown & Sonwa, 2015; Bofo et al., 2019). Berikut beberapa temuan dari penelitian ini:

Proses Pemasaran Kubis di kabupaten Semarang dan Dampaknya terhadap Petani

Dalam kerangka pengembangan kelembagaan agribisnis yang berkelanjutan, salah satu indikator yang dapat diamati adalah bagaimana sistem pemasaran komoditas dijalankan oleh petani. Saluran distribusi yang panjang dan tidak efisien umumnya merupakan gejala dari kelemahan kelembagaan lokal, seperti lemahnya koperasi petani, kurangnya kemitraan strategis dengan sektor swasta, serta minimnya akses terhadap informasi pasar. Oleh karena itu, analisis terhadap pola saluran pemasaran kubis menjadi penting untuk memahami sejauh mana kelembagaan lokal di Kabupaten Semarang telah berperan dalam meningkatkan efisiensi pemasaran dan memperkuat posisi tawar petani. Pola pemasaran kubis di Kabupaten Semarang, khususnya di wilayah Getasan masih berjalan secara tradisional dengan melibatkan banyak lapisan perantara, mulai dari tengkulak hingga pedagang besar dan pengecer sebelum hasil panen sampai ke tangan konsumen. Rantai distribusi yang Panjang dan terpecah-pecah ini membuat petani berada pada posisi yang kurang menguntungkan, karena harga jual lebih banyak dikendalikan oleh pihak perantara dibandingkan oleh petani itu sendiri. Meskipun demikian, dari sisi ekonomi, budidaya kubis tetap menunjukkan prospek yang menjanjikan. Dengan pengeluaran produksi rata-rata sekitar Rp22,37 juta per hektar, dan pendapatan yang diperoleh mencapai sekitar Rp40,28 juta, maka keuntungan bersih yang diraih petani berada pada kisaran Rp17,92 juta per hektar setiap kali musim tanam berlangsung. Tingkat efisiensi pemasaran sangat dipengaruhi oleh panjang-pendeknya rantai distribusi.

Tabel 1. Saluran Pemasaran Kubis Di Kabupaten Semarang

Saluran Pemasaran	Biaya Pemasaran (Rp/kg)	Efisiensi (%)
Saluran I (petani-tengkulak-pengumpul-pedagang besar-eceran-konsumen)	1.082,54	18,78
Saluran II (petani-pedagang besar-eceran-konsumen)	756,26	12,86
Saluran III (petani-eceran-konsumen)	316,67	6,03

Sumber: Hasil Analisis, 2025.

Pemasaran kubis masih tergolong tidak efisien karena panjangnya rantai distribusi yang harus dilalui. Dari berbagai jalur pemasaran yang ada, penjualan langsung oleh petani kepada konsumen (saluran III) terbukti sebagai yang paling efisien, dengan biaya pemasaran hanya sebesar Rp361,67 per kilogram dan Tingkat efisiensi mencapai 6,03%. Sayangnya, mayoritas petani masih mengandalkan saluran I dan II yang melibatkan banyak pihak perantara. Kedua saluran ini memerlukan biaya pemasaran yang jauh lebih tinggi, yakni antara Rp 756,26 hingga Rp 1.082,54 per kilogram, dengan efisiensi yang lebih rendah, yaitu antara 12,82% hingga 18,78%. Akibatnya, porsi keuntungan terbesar justru dinikmati oleh para pelaku distribusi, sementara petani sebagai produsen utama memperoleh bagian paling kecil dari nilai akhir produk.

Pemasaran melalui saluran I dan II pada akhirnya berdampak pada posisi tawar petani yang lemah karena harga jual umumnya ditetapkan oleh pedagang perantara, bukan berdasarkan kesepakatan yang adil dari sisi produsen. Dalam praktiknya, petani hanya memperoleh harga akhir yang telah dikurangi oleh margin keuntungan dari setiap pelaku di tingkat hilir, seperti pedagang besar dan pengecer. Struktur pemasaran yang masih konvensional dan terpecah-pecah ini membuat proses penjualan menjadi kurang efektif dan efisien, sehingga potensi peningkatan pendapatan petani belum dapat dimaksimalkan secara optimal.

Penguatan Kelembagaan Lokal dan Peran Aktor *Penta Helix* dalam Agribisnis Kubis di Kabupaten Semarang

Penguatan kelembagaan lokal dalam pengembangan agribisnis kubis di Kabupaten Semarang melibatkan peran aktif berbagai aktor sesuai model penta helix, yaitu pemerintah, akademisi, komunitas (kelompok tani dan koperasi), swasta, dan media, yang secara sinergis berkontribusi untuk meningkatkan kinerja agribisnis dan kesejahteraan petani. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Semarang, berperan sebagai fasilitator utama untuk menyediakan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan teknologi budidaya serta pascapanen kubis. Pemerintah juga menginisiasi program pengembangan hortikultura organik, serta merancang kebijakan dan program pembangunan kawasan agropolitan yang mendukung penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha. Namun, masih terdapat tantangan berupa kurangnya koordinasi, sinkronisasi, dan konsistensi kebijakan, serta belum adanya landasan hukum yang kuat untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan secara optimal di tingkat daerah (Suyatno, 2008).

Akademisi berkontribusi melalui penelitian, pelatihan, dan transfer teknologi yang relevan, serta evaluasi kelembagaan untuk memberikan rekomendasi strategis yang meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan dalam mengadopsi teknologi modern dan mengelola agribisnis secara berkelanjutan (Aprilliyanti et al., 2024). Kelompok tani dan koperasi sebagai komunitas petani berperan penting dalam mengorganisasi petani untuk pengadaan sarana produksi, pemasaran kolektif, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi dan teknologi. Sebagai contoh, kelompok tani di Desa Batur berfungsi sebagai sarana belajar dan tempat berbagai pengalaman yang membantu petani beradaptasi dengan sistem pertanian organik, memperluas akses pasar, dan menjaga stabilitas harga, sehingga mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan pedagang pengumpul (Darwanto, 2016). Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan komunitas yakni kelompok tani dan koperasi yang ada di Kabupaten Semarang, mereka saling bergotong royong untuk pengembangan agribisnis di daerah ini. Lalu, sektor swasta termasuk *off-taker* dan pelaku rantai pasok, berperan dalam memperpendek rantai pemasaran dengan menjalin kemitraan langsung dengan petani, menyediakan sarana produksi, pembiayaan, dan akses pasar yang lebih stabil dan luas, sehingga meningkatkan efisiensi pemasaran dan margin keuntungan petani. Kemitraan swasta juga memberikan kepastian harga dan mengurangi risiko pasar bagi petani, mendukung keberlanjutan agribisnis kubis. Media berfungsi sebagai saluran komunikasi dan informasi yang menyebarkan teknologi pertanian, memperluas peluang pasar, program pemerintah, serta keberhasilan kelembagaan petani, sekaligus menjadi alat advokasi untuk memperjuangkan kepentingan petani dan memperkuat jejaring komunikasi antar aktor penta helix. Sinergi antar aktor ini menjadi kunci dalam mengatasi kelemahan pemasaran kubis yang masih didominasi rantai distribusi panjang dan posisi tawar petani yang lemah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemasaran, memperkuat posisi tawar petani, memperluas akses pasar dan pembiayaan, serta meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas kubis secara berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

Sinergi Penta Helix untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kubis

Kolaborasi penta helix dalam pengembangan agribisnis kubis di Kabupaten Semarang berperan strategis dalam menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Keterlibatan aktif lima unsur utama yakni pemerintah, akademisi, komunitas, swasta dan media berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal serta mendorong efisiensi dalam sistem pemasaran yang selama ini menjadi hambatan utama. Melalui kerjasama ini, rantai distribusi yang sebelumnya berbelit-belit dapat dipangkas, sehingga menurunkan

biaya pemasaran dan meningkatkan keuntungan petani. Kemitraan yang terjalin juga memperluas akses petani terhadap pasar dan sumber pembiayaan, memungkinkan mereka mengembangkan skala produksi dan mengaplikasikan teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas dan mutu kubis. Nilai jual komoditas pun bertambah seiring penerapan inovasi dan pengelolaan agribisnis yang lebih profesional. Secara keseluruhan, sinergi antar pemangku kepentingan akan memperkuat daya saing agribisnis kubis di tingkat lokal dan regional serta mendorong peningkatan pendapatan petani secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan melalui sinergi penta helix menjadi landasan penting dalam mengembangkan agribisnis kubis yang tidak hanya produktif, tetapi juga mensejahterakan petani di Kabupaten Semarang.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan agribisnis hortikultura, khususnya komoditas kubis di Kabupaten Semarang, masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang cukup kompleks, terutama terkait kelemahan kelembagaan lokal dan belum optimalnya kolaborasi antar aktor utama. Pola pemasaran kubis masih didominasi oleh rantai distribusi yang panjang, menyebabkan efisiensi rendah dan posisi tawar petani sangat lemah. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya pendapatan yang diterima petani dibandingkan nilai akhir produk. Implementasi pendekatan *Penta Helix* telah dilakukan, di mana peran pemerintah, akademisi, komunitas (kelompok tani dan koperasi), sektor swasta, serta media sudah mulai terlihat, namun sinerginya belum terbangun secara optimal. Terlihat bahwa inisiatif kelembagaan seperti koperasi telah mengalami perkembangan pada beberapa wilayah seperti Kecamatan Getasan, namun belum merata di seluruh kawasan penghasil kubis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar aktor pengembangan masih belum terkoordinasi secara sistematis dan menyeluruh. Struktur kelembagaan lokal sudah mulai terbentuk namun masih perlu penguatan dari sisi manajerial, legalitas, dan akses terhadap sumber daya. Pendekatan *Penta Helix* memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi agribisnis dan kesejahteraan petani jika diimplementasikan secara konsisten dan terintegrasi dalam tiga tahap pengembangan potensi lokal desa: *planting & preparing*, *harvesting & developing*, dan *maintaining & expanding*.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat kelembagaan agribisnis serta meningkatkan efektivitas kolaborasi antar aktor dalam pengembangan komoditas kubis di Kabupaten Semarang diantaranya:

1. Perlu penguatan peran kelembagaan petani, khususnya koperasi dan kelompok tani, agar mampu menjadi aktor utama dalam rantai nilai agribisnis yang lebih efisien dan berpihak pada petani
2. Kolaborasi antar aktor dalam pendekatan Penta Helix perlu diperkuat dan diformalkan dalam kebijakan daerah agar tidak bersifat sporadis, tetapi berkelanjutan dan strategis.
3. Perlu intervensi konkret dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemasaran langsung petani melalui dukungan logistik, teknologi, serta pembentukan jaringan kemitraan pasar yang adil dan transparan.

Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, komunitas petani, akademisi, maupun sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agyemang, M., Zhu, Q., & Tian, Y. (2015). Analysis of opportunities for greenhouse emission reduction in the global supply chains of cashew industry in West Africa. *Journal of Cleaner Production*, 115, 149–161. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.059>
- Aprilliyanti, E., Suswadi, Arbianti, & Prasetyo, A. (2024). Peran kelembagaan dalam pengembangan agribisnis kubis (*Brassica oleracea*) pada Kelompok Tani Argoayuningtani di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Agrineca*, 24(2), 35–46.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah* (Edisi 1). BPFE.
- Boafo, J., Appiah, D. O., & Tindan, P. D. (2019). Drivers of export-led agriculture in Ghana: The case of emerging cashew production in Ghana's Brong Ahafo Region. *Australasian Review of African Studies*, 40(1), 31–52. <https://doi.org/10.22160/22035184/ARAS-2019-40-1/31-52>
- Brown, H. C. P., & Sonwa, D. J. (2015). Rural local institutions and climate change adaptation in forest communities in Cameroon. *Ecology and Society*, 20(2). <https://doi.org/10.5751/ES-07327-200206>
- Darwanto, I. P. (2016). *Peran kelompok tani sayuran organik terhadap pengembangan ekonomi lokal (Studi kasus Desa Batur, Kabupaten Semarang)* [Tesis, universitas tidak disebutkan].

- Fatimah, S., & Naldi, J. (2019). Implementation of the Pentahelix approach model against development sustainable tourism. *International Journal of Tourism, Heritage and Recreation Sport*, 1(2), 20–30.
- Horton, D., Alexaki, A., Bennett-Lartey, S., Brice, K. N., Campilan, D., Carden, F., & Muniruzzaman, I. K. (2003). *Evaluating capacity development: Experiences from research and development organizations around the world*. International Service for National Agricultural Research (ISNAR), International Development Research Centre (IDRC), & ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA).
- Martodireso, S., & Suryanto, A. W. (2002). *Agribisnis kemitraan*. Usaha Bersama.
- Matei, A. I., & Iordache, L. (2016, May). Administrative capacity development for the modernisation of rural communities in Romania. In *Proceedings of the 11th Edition of the International Conference "European Integration—Realities and Perspectives* (pp. 137–144).
- McComb, E. J., Boyd, S., & Boluk, K. (2016). Stakeholder collaboration: A means to the success of rural tourism destinations? A critical evaluation of the existence of stakeholder collaboration within the Mournes, Northern Ireland. *Tourism and Hospitality Research*, 17(3), 286–297.
- Oloo, J. O., & Omondi, P. (2017). Strengthening local institutions as avenues for climate change resilience. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 8(5), 573–588.
- Rivera, M., Knickel, K., Díaz-Puente, J. M., & Afonso, A. (2019). The role of social capital in agricultural and rural development: Lessons learnt from case studies in seven countries. *Sociologia Ruralis*, 59(1), 66–91.
- Sayoga, A. A. H. E. (2019). Strategi peningkatan manfaat ekonomi di lahan kritis Kecamatan Bancak melalui agrobisnis komoditas. *Sinov: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 2(2).
- Sayoga, A. A. H. E. (2022). Cashew agribusiness value chain study in Wonogiri Regency. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 17(2).
- Sayoga, A. A. H. E., & Kharisma, N. (2024). Pengembangan kapasitas dalam mendukung pemerintahan daerah yang inklusif. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 20(2), 125–134.
- Sudiana, K., Sule, E. T., Soemaryani, I., & Yunizar, Y. (2020). The development and validation of the Pentahelix construct. *Business: Theory and Practice*, 21(1), 136–145.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Surya, B., Saleh, H., Idris, M., & Ahmad, D. N. A. (2021). Rural agribusiness-based agropolitan area development and environmental management sustainability: Regional economic growth perspectives. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(1), 142–157.

- Suyatno, Y. (2008). *Penguatan strategi pengembangan kawasan agropolitan berbasis peningkatan daya saing produk agribisnis unggulan di Kabupaten Semarang*.
- Wankmüller, C., & Reiner, G. (2020). Coordination, cooperation and collaboration in relief supply chain management. *Journal of Business Economics*, 90, 239–276.